

Kebijakan Pendidikan Islam: Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi

Andi Wahyono

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: andiwahyono1990@yahoo.co.id

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.115-134

Abstract

This paper is going to discuss and to provide solutions for the problems of dualism policy in the Islamic higher education institution. The effort to integrate religious education and general education has not reached a satisfactory result. Several concepts have been offered, but they still leave the problems off dualism policy in the Islamic higher education institution. Therefore, I offer the concept of hybridization of higher educations. This endeavor is very urgent to be done because there is a tendency of Islamic higher education institutions and general higher education institutions to be more apart, although there are the offers of concept of science Islamization, Islam as Science, or the integration and interconnection of science.

Keywords: *Hybridication, Education Policy, Higher Education Institution.*

Abstrak

Tulisan ini hendak mempersoalkan sekaligus memberi solusi terhadap permasalahan dualisme kebijakan lembaga pendidikan tinggi islam. Upaya memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum belum sampai pada kata memuaskan. Beberapa konsep sudah ditawarkan namun masih menyisakan persoalan berupa dualisme kebijakan lembaga pendidikan tinggi Islam. Oleh karena itu, saya menawarkan konsep tentang hibridasi lembaga pendidikan tinggi. Usaha ini sangat mendesak untuk dilakukan karena ada kecenderungan lembaga pendidikan tinggi Islam dan lembaga pendidikan tinggi umum justru semakin berjalan sendiri-sendiri, sekalipun sudah ada tawaran konsep tentang Islamisasi ilmu, Islam sebagai ilmu, ataupun integrasi dan interkoneksi keilmuan.

Kata Kunci: *Hibridasi, Kebijakan Pendidikan, Lembaga Pendidikan Tinggi.*

Pendahuluan

Islam mengalami keterpurukan yang panjang dalam bidang ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Islam terhenti pada dinasti Abbasiyah pada abad pertengahan. Sampai saat ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, para ilmuwan dan umat Islam secara umum masih selalu mengekor kepada Barat. Hampir seluruhnya (untuk tidak mengatakan tidak ada) penemuan baru dan teori ilmu modern selalu dilahirkan dari rahim Barat. Memang dari ilmu-ilmu baru yang dilahirkan tersebut ada yang memberikan sumbangsih positif terhadap kemajuan zaman. Namun demikian, ada sebagian ilmu yang lahir justru menimbulkan kerusakan pada alam dan logika untuk saling menghancurkan antar sesama manusia. Hal ini terjadi karena ilmu yang lahir adalah ilmu sekuler murni yang tidak dilandasi dengan etika dan moral yang kental. Untuk itu sudah saatnya Islam mengambil alih kendali keilmuan agar tugas manusia *khalifah* benar-benar dapat diemban dengan *kaffah*. Ilmu pengetahuan dapat mengandung nilai yang membawa kebaikan untuk alam semesta dan orang yang akan menggunakan ilmu itu akan dilandasi dengan nilai-nilai Islam universal untuk menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh makhluk di dunia ini.

Sudah ada upaya yang dilakukan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan mengambil alih ilmu pengetahuan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi. Namun demikian, ada ancaman serius yang dihadapi lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Ancaman tersebut berupa kurang diminatinya fakultas-fakultas dan jurusan yang dibuka oleh lembaga pendidikan tinggi Islam berupa fakultas yang mengkaji tentang Islam normatif. Hal ini dikarenakan Islam normatif dianggap tidak dapat menyelesaikan problem dan tantangan modernisasi. Nasib yang lebih baik dialami oleh lembaga pendidikan Islam pada level pendidikan dasar, menengah, dan atas. Banyak contoh madrasah atau sekolah umum yang berlabelkan Islam sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan pesantren yang dulunya identik sebagai tempat belajar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kini bertransformasi menjadi pesantren modern dan menjadi tujuan utama orang tua dari kalangan menengah ke atas untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya.

Hal ini terjadi karena banyak madrasah, sekolah, pesantren yang menawarkan menu baru dalam “menjual” materi dan konsep pembelajaran mereka. Misalnya madrasah atau pesantren yang menawarkan penguasaan ilmu alat (bahasa Inggris-Arab). Menu ini dimanfaatkan oleh para orang tua sebagai bekal anaknya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di luar negeri. Sekali lagi sebagian besar masyarakat hanya berminat kepada pendidikan dasar sampai menengah Islam

untuk mempersiapkan anaknya melanjutkan ke pendidikan tinggi umum atau bahkan sebagai batu loncatan belajar di luar negeri.

Menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks lembaga pendidikan Islam dituntut untuk mampu beradaptasi dengan wacana keilmuan modern dan para alumni dituntut mampu mengmalkan ilmu pengetahuannya dilandasi dengan etika dan moral yang dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas dan bijak. Jika tantangan tersebut tidak mampu dijawab maka berakhirilah sudah kejayaan lembaga pendidikan Islam yang digadang-gadang sebagai produk unggulan umat Islam. Memang benar, dalam dasa warsa terakhir dikalangan dunia Islam muncul dan berkembang kesadaran urgensi dan rekonstruksi peradaban Islam melalui penguasaan sains dan teknologi. Tetapi, tantangan-tantangan yang dihadapi luar biasa kompleks baik secara internal maupun eksternal.¹ Oleh karena itu diperlukan pemikiran jernih dan luas serta perlu unsur kehati-hatian dalam menentukan dan memutuskan kebijakan tentang bagaimana nasib lembaga pendidikan Islam dimasa yang akan datang.

Saat ini sudah ada banyak usaha yang dilakukan dalam rangka membenahi lembaga pendidikan tinggi Islam agar mampu eksis dan *survive* di tengah tantangan zaman. Salah satu usaha yang dimaksud adalah adanya tren transformasi lembaga pendidikan tinggi Islam dalam hal ini STAIN dan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam yang mulanya hanya dapat membuka fakultas agama, maka setelah menjadi UIN lembaga tersebut dapat membukan fakultas umum. Dengan demikian, akhirnya minat masyarakat akan kembali tinggi apalagi tarif biaya di UIN jauh lebih rendah dibandingkan di lembaga pendidikan umum.

Namun demikian, kebijakan transformasi atau konversi IAIN menjadi UIN nampaknya menyisakan dampak negatif yang ditinggalkan. Jika pada awalnya IAIN memiliki fakultas agama (Tarbiyah, Syariah, Dakwah, Adab, dan Ushuludin), maka konsekuensi logis yang ditimbulkan dari konversi tersebut adalah UIN harus membuka fakultas-fakultas umum. Akibat dari transformasi ini, akan muncul dua kebijakan yang akan mengatur satu tubuh UIN. Singkatnya dalam satu tubuh UIN akan berada dalam dua kendali kebijakan yaitu fakultas agama berada di bawah Kementerian agama dan fakultas umum berada di bawah Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sekilas permasalahan ini tidak akan menimbulkan dampak besar, namun adanya tumpang tindih kebijakan dan adanya kemungkinan kebijakan yang tidak selaras dapat menjadikan tubuh UIN menjadi "sakit" karena tak tentu arah dan memikul beban yang berat.

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam :Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru* (Jakarta: LOgOS, 1999), hlm. 11-12.

Selain permasalahan tersebut, masih ada hal urgen dalam tubuh pendidikan Islam yang terkadang dikesampingkan. Selama ini, materi-materi agama Islam yang diajarkan adalah materi yang berasal dari buku paket yang diberikan oleh Kementerian agama. Kita kadang lupa bahwa pada realitasnya dalam tubuh umat Islam di Indonesia, banyak perbedaan-perbedaan pemahaman yang terjadi misalnya urusan ibadah, muamalah dan permasalahan *khilafiyah*. Perbedaan pemahaman tersebut seolah tidak dihirauhkan, salah satu contohnya adalah pada buku materi pelajaran fiqh di sekolah, madrasah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Bacaan-bacaan doa shalat hanya dimuat bacaan dari salah satu sumber saja, padahal bacaan tersebut yang sama-sama *shahih* ada banyak macam.

Pada lingkaran akademis fenomena tersebut saya sebut sebagai dualisme kebijakan dalam pendidikan Islam. Selain permasalahan dualisme, tubuh pendidikan Islam juga terjangkit penyakit saling memusuhi dan merasa paling benar atas keyakinan agamanya yang ditimbulkan dari materi pelajaran agama yang terkesan “memaksa” kepada peserta didik dan menafikan keberagaman pemahaman yang tumbuh. Untuk itu tulisan ini hendak merespon permasalahan tersebut dengan menggagas format pendidikan Islam baru baik dalam hal kelembagaan maupun dalam hal materi pembelajaran. Dengan demikian, besar harapan saya bahwa masa depan pendidikan Islam akan lebih cerah dan nilai-nilai Islam yang universalakan mampu membawa seluruh komponen pendidikan menuju *shirāt al-mustaqim* mewujudkan ulama intelek dan intelek ulama.

Akar Dikotomi dan Dualisme Pendidikan Tinggi Islam

Sebelum jauh melangkah ke belakang menelusuri akar dikotomi dan dualisme kebijakan lembaga pendidikan Islam, ada baiknya perlu adanya persamaan persepsi awal tentang makna dikotomi dan dualisme itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar kita mendapatkan titik awal untuk melangkah menelusuri jalan panjang menuju akar dikotomi dan dualisme kebijakan lembaga pendidikan tinggi Islam.

Dalam konteks pendidikan, Marwan Sarijo² menyatakan bahwa istilah dualisme dan dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Berangkat dari pemaknaan singkat tersebut maka dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Maka yang dimaksud pendidikan agama adalah materi-materi yang membahas permasalahan agama dalam bingkai agama normatif dan yang dimaksud ilmu umum adalah ilmu yang berisi materi non-agama berupa ilmu dalam bingkai historis. Dualisme dan

² Marwan Saridjo, *Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amissco, 1996), hlm. 22.

dikotomi ini, bukan hanya pada tataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah pemisahan. Dalam operasionalnya, pada madrasah dan sekolah terjadi pemisahan antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama. Dalam pendidikan tinggi Islam pemisahan terjadi pemisahan kebijakan fakultas agama dan fakultas umum.

Fenomena dikotomi ini, memicu anggapan adanya kemunduran keilmuan dalam dunia Islam. Kemunduran penguasaan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam menurut Fazlur rahman diakibatkan adanya dikotomi ilmu, yaitu ilmu tradisional (agama) dan ilmu sekuler-modern (umum).³ Namun demikian, jika kemunduran umat Islam hanya diakibatkan karena dikotomi ilmu yang hanya sekedar membedakan atau mengklasifikasi ilmu menjadi “ilmu agama” dan “ilmu sekuler”, maka sebenarnya tidak akan menjadi masalah yang besar jika tidak berlebihan. Dalam dunia Islam probelmatika dikotomi sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi pada mulanya permasalahan dikotomi tersebut tidak menimbulkan banyak problem dalam sistem pendidikan islam, hingga sistem pendidikan sekuler Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme.⁴

Dari sudut pandang sejarah, dikotomi ilmu telah dimulai sejak zaman pertengahan meski pada mulanya, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat berkembang dikalangan umat Islam. Zaman pertengahan tersebut adalah ketika dinasti ummayyah berkuasa. Dinasti umayyah merupakan masa tunas perkembangan intelektual Islam.⁵ Namun demikian, tradisi keilmuan mengalami kemajuan sangat pesat pada masa Abbasiyah, penerjemahan naskah-naskah kuno, penemuan ilmu-ilmu hitung dan fisika hingga pendirian Baitul hikmah yang menjadi tanda mercusuar dari peradaban Islam. Masa Abbasiyah ini dikenal sebagai masa puncak kejayaan Islam.⁶

Akan tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada peradaban selanjutnya panggung kejayaan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam hampir sepenuhnya runtuh. Umat Islam bahkan secara sadar memperlakukan diskriminasi terhadap “ilmu-ilmu umum” yang dinilai hanya mempelajari ilmu sekuler yang sama sekali tidak bersentuhan dengan Islam. Sedangkan “ilmu agama” yang mempelajari wilayah agama dalam bingkai normatif dipandang sebagai sebuah kajian keilmuan yang paling utama dipelajari. Dengan demikian, ilmu umum dianggap sekuler atau bahkan dianggap ilmu kafir yang haram dipelajari karena tidak akan mendekatkan

³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*(Chicago: The Chicago University Press, 1984), hlm. 33.

⁴ Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Bandung: Arasyi Mizan, 2005), hlm. 19.

⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arab*, (London: Macmillan Press Ltd, 1974), hlm. 240.

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

pada Tuhan, sebaliknya ilmu tersebut dianggap akan jauh memisahkan manusia dari Tuhannya.

Dari pemahaman dikotomik tersebut, berkembanglah pemahaman bahwa ilmu-ilmu agama adalah ilmu utama dalam proses pendidikan yang terlembagakan. Dalam kerangka seperti itu maka ilmu agama khususnya *fiqh* dinobatkan sebagai mahkota ilmu.⁷ Lebih dari itu, tidak kurang dari tiga status yang diberikan pada mereka yang telah menempati posisi puncak tersebut, yaitu *faqih*, *mufi* dan *mudarris*.⁸ Dalam kenyataannya, tiga status tersebut secara eksklusif menjadi hak penuh para doktor *fiqh* (hukum). Oleh karena itu Makdisi berpendapat bahwa berdirinya Madrasah memiliki kaitan erat dengan pembentukan madzhab.⁹ Dalam posisi semacam ini, seorang ahli hukum (*fuqaha*) menempati posisi yang tertinggi dan *syekh* sebagai pengampu pengajaran ilmu-ilmu yang lain berada di bawahnya.¹⁰

Keududukan *fiqh* yang memuncak menjadikan ilmu-ilmu yang lain menjadi termarginalkan. Menurut Azzumardi Azra, ada tiga hal yang melingkupinya; (1) berkaitan dengan pandangan ketinggian syari'ah diatas ilmu-ilmu yang lain; (2) secara institusi kelembagaan pendidikan Islam dikuasai oleh mereka yang ahli dalam bidang agama; dan (3) Hampir seluruh madrasah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf dari dermawan kaya atau penguasa politik Muslim.¹¹ Dengan demikian, dapat dikatakan dalam tubuh pendidikan Islam mulai muncul dikotomi dan dualisme yang terang terjadi di lembaga pendidikan Islam.

Dampaknya, jurang pemisah antara makna integral keilmuan dan keislaman menjadi semakin lebar. Hal ini berdampak muatan ilmu pengetahuan umum terlalu jauh dari nilai agama dan ilmu agama sama sekali tidak menjamah keilmuan umum. Hal ini didasarkan pada perlengkapan keilmuan yang terlalu minim untuk mampu bergumul dengan realitas yang mencekam.¹² Melihat realitas keterpurukan dan ketertinggalan tersebut, dalam dunia Islam kontemporer muncul para pemikir yang gelisah dan melorkan gagasan-gagasan dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan Islam. Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Seyyed Hossein Nasr, Ismail Raji' al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naquib al-Attas adalah sedikit contoh dari para tokoh kontemporer dan masih banyak yang lainnya bersama-sama merumuskan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam.

⁷ George Makdisi, *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West: With Special Reference to Scholasticism*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), hlm. 79.

⁸ George Makdisi, *Religion, Law and Learning*, (Great Britain: Variorum, 1991), hlm. 176.

⁹ Albert Hourani, *A History of Arab Peoples*, (New York: Warner Books, 1992), hlm. 163.

¹⁰ George Makdisi, *The Rise of Humanism...*, hlm. 153.

¹¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hlm. x-xi.

¹² A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 150.

Paradigma Integrasi Islam, Sains, dan Ilmu Pengetahuan

Setelah jauh melangkah menelusuri akar dikotomi dan dualisme pendidikan Islam, kesimpulan awal yang dapat kita ambil adalah faktor kemunduran umat Islam saat ini adalah adanya dikotomi dan dualisme pendidikan Islam. Untuk itu para pemikir Islam mencoba membuat formulasi dan konsep baru dalam rangka meretas dikotomi dan dualisme tersebut. Pada bagian ini akan dibahas mengenai gagasan paradigma yang dibangun oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer dalam usahanya menggagas sebuah bangunan keilmuan yang memadukan unsur-unsur agama dan ilmu. Dengan keterbatasan yang penulis miliki dan tidak bermaksud mengenyampingkan pemikir yang lain, paling tidak ada tiga tokoh yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: Muhammad Naquib, Kuntowijoyo, dan M. Amin Abdullah.

a. Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Sayed Naquib al-Attas)

Sayed Naquib Al-Attas seorang pemikir dalam dunia Islam yang kemudian menyadari bahwa ilmu pengetahuan modern ternyata syarat dengan nilai barat. Untuk mencapai kebenaran, ilmu tersebut sangat mengedepankan akal rasional, dampaknya nilai-nilai dan pesan keagamaan menjadi terabaikan. Bagi al-attas keilmuan barat dibangun atas kerguan, kebingungan, skeptisisme dan tidak dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama, sehingga menjadi sekuler dan tidak mengindahkan nilai-nilai etika.¹³ Berdasarkan fenomena tersebut maka yang harus dilakukan oleh para ilmuwan muslim adalah dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi al-Attas, Islamisasi merupakan “pembebasan manusia mulai dari magis, mitos, animisme, dan tradisi kebudayaan kebangsaan dan kemudian dari penguasaan sekuler atas akal dan bahasa.”¹⁴ Bagi al-Attas, aplikasi Islamisasi ilmu pengetahuan diwujudkan dengan mengubah konsep-konsep Islam yang terdiri dari (1) manusia; (2) *di>n*; (3) *ilm* dan *ma’rifah*; (4) hikmah; (5) ‘*adl*’; (6) amal-‘*adah*’; (7) konsep universitas.¹⁵ Al-attas menginginkan aplikasi islamisasi ilmu pengetahuan merupakan usaha mengislamkan konsep-konsep keilmuan Barat kepada konsep *tauhi>d*, *syari>’ah*, *si>rah*, dan *ta>rikkh* sehingga hasilnya adalah sains Islam, psikologi Islam, sosiologi Islam, ekonomi Islam yang lebih substantif, karena konsep-konsep dasarnya berdasarkan Islam.¹⁶

¹³ Iwan Setiawan dalam Amin Abdullah dkk, *Islamic Studies dalam paradigma Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta,:SUKA Press, 2007) hlm. 46.

¹⁴ Rosnani Hasim, “Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer: Sejarah, Perkembangan Dan Arah Tujuan”, *Islamika*, tahun 1 No 6, Juli-September 2005, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁶ Iwan Setiawan dalam Amin Abdullah dkk, *Islamic Studies...*, hlm.47.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa langkah yang diambil al-Attas dalam rangka Islamisasi ilmu pengetahuan adalah dengan berangkat dari konteks dimana sebuah ilmu itu lahir dan ada kemudian diangkat kedalam teks wahyu. Dengan pandangan yang semacam ini, nampaknya akan menimbulkan dilema yang terjadi yaitu terlihat kemungkinan dimensi Islam akan sangat meluas. Konsekuensi konsep ini adalah Islam tidak hanya terbatas pada teks suci dan teologis, namun bisa meluas pada wilayah yang dianggap duniawi.

b. Pengilmuan Islam (Kuntowijoyo)

Kuntowijoyo melakukan kritik terhadap paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan berangkat dari ketidak sepakatannya dengan penggunaan istilah Islamisasi ilmu pengetahuan untuk melakukan "syahadat" terhadap ilmu-ilmu sekuler. Menurutnya bahwa dalam rangka Islamisasi pengetahuan, umat Islam harus meninggalkan makna lama yaitu Islamisasi pengetahuan menuju paradigma baru yaitu pengilmuan Islam.¹⁷ Paradigma tersebut dirasa lebih tepat karena jika masih menggunakan paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan, maka yang terjadi adalah adanya realitas historis yang ditarik dan "dipaskan" pada teks wahyu. Hal tersebut memang dapat menimbulkan konflik karena Dengan kebenaran wahyu yang abadi akan terancam oleh benturan-benturan perdebatan dan falsifikasi antar ilmu pengetahuan dan teori. Berangkat dari kemungkinan buruk tersebut, Kuntowijoyo menggunakan konsep pengilmuan Islam yang berangkat dari teks ke konteks, maka konsep ini dipandang lebih tepat dan tidak rekasionaer terhadap upaya penyatuan Islam dan ilmu pengetahuan.

Adapun metodologi yang ditawarkan Kuntowijoyo dalam konsep pengilmuan Islam ada dua. Pertama integralisasi yaitu pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu (petunjuk Allah dalam Al-Qur'an beserta pelaksanaannya dalam sunah Nabi). Kedua objektifikasi yaitu menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang.¹⁸ Menurut Kunto ada perbedaan paradigmatis antara ilmu-ilmu sekuler dengan ilmu-ilmu integralistik. Hal ini didasarkan pada apa yang dimaksud Thomas Khun dalam *The Structure of Scientific Revolution*, bahwa ilmu-ilmu sekuler sebagai *normal sciences* dan ilmu-ilmu integralistik adalah suatu revolusi.¹⁹

¹⁷ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Teraju, 2004), hlm. 48.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

Pengilmuan Islam juga tidak bebas dari dilema yang harus dihadapi dilema tersebut adalah seperti yang ditawarkan oleh Kuntowijaya, kita akan melihat Islam sebagai entitas yang aktif, namun dengan ini ilmu pengetahuan dikhawatirkan hanya akan terpasung pada dimensi yang bisa dicakup oleh Islam. Dalam Al Quran, berbagai panduan hidup telah tertuliskan, namun kitab suci ini bukanlah sumber sumber teknis yang menyediakan solusi detail atas segala permasalahan yang dihadapi manusia. Dalam berbagai masalah seperti kebutuhan sumber daya alternatif, menipisnya lapisan ozon, sampai kebutuhan imunitas akan berbagai varian virus baru tidak dituliskan secara detail di kitab suci. Dari berbagai hal tersebut, terlihat bahwa memposisikan Islam sebagai Ilmu juga menuai dilema karena Islam sendiri tidak menyediakan solusi teknis atas segala permasalahan kehidupan.

c. Integrasi-Interkoneksi Keilmuan (M. Amin Abdullah)

Integrasi secara bahasa diartikan sebagai “berlawanan dengan pemisahan”, yaitu usaha memadukan ilmu umum dan ilmu agama.²⁰ Secara lebih mendalam Armahedi Mazhar melihat inti dari integrasi adalah meletakkan hirarki keilmuan dalam suatu hirarki yang lebih besar dengan memasukan alam akherat dan ciptaan Tuhan itu sendiri sebagai penunjang jenjang materi.²¹ Perbedaan yang mendasar antara Islamisasi ilmu pengetahuan, dan integrasi adalah dalam hal pelumatan keilmuan umum dan agama.²² Dalam Islamisasi ilmu, keilmuan Islam akan memilih ilmu-ilmu yang dianggap Islami dan ilmu yang bukan Islami dengan menghilangkan ilmu-ilmu yang bukan Islami atau tidak cocok dengan Islam.²³ sedangkan integrasi dalam hal ini berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan umum dan Islam tanpa harus menghilangkan keunikan-keunikan antara dua keilmuan tersebut.²⁴

Namun demikian, dalam pandangan Amin Abdullah, integrasi mengalami kesulitan, yaitu kesulitan memadukan studi Islam dan umum yang kadang tidak saling akur karena keduanya ingin saling mengalahkan untuk itu perlu adanya gagasan interkoneksi yang lebih arif dan bijaksana.²⁵ Adapun yang dimaksud interkoneksi menurut Amin Abdullah adalah usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, sehingga setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (Islam,

²⁰ Ayzumardi Azra, “Reintegrasi ilmu-ilmu dalam Islam”, Zainal Abidin Bagir, (ed) *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 19.

²¹ Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam*, (Bandung Mizan, 2004), hlm. xxxvii

²² Iwan Setiawan dalam, Amin Abdullah, *Islamic Studies...*, hlm. 50.

²³ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

Kristen, Budha, dll) keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri maka dibutuhkan kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan antara disiplin keilmuan.²⁶

Pendekatan integratif-interkonektif adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai; keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan manusia, hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan (*approach*) dan metode berfikir (*process and procedure*) antara kedua keilmuan tersebut.²⁷

Setelah dipaparkan ketiga paradigma usaha mendamaikan Islam dan ilmu pengetahuan, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang besar atas karya akademik tersebut. Namun demikian, sayangnya usaha mendamaikan ilmu tersebut tidak disertai dengan usaha mendamaikan lembaga pendidikan. Usaha yang dilakukan masih sebatas pada usaha mendamaikan pada wilayah materi Islam dan ilmu pengetahuan sehingga permasalahan dikotomi dan dualisme lembaga pendidikan Islam masih belum dapat diatasi secara keseluruhan.

Kebijakan yang Menceraikan Lembaga Pendidikan Islam

Selanjutnya, jalan panjang dualisme dan dikotomi pendidikan juga merambah dan sampai di Indonesia. Permasalahan dikotomi dan dualisme pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari potret sejarah masa lalu (masa penjajahan). Karel Steenbrink menjelaskan secara kritis bahwa pemerintah Belanda ingin membangun sistem pendidikan yang berdasarkan sistem pribumi murni dan disesuaikan dengan masyarakat desa, yang dikaitkan dengan pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya.²⁸ Apa yang disebutkan oleh Stennbrink merupakan gagasan Gubernur Jenderal Van Der Capellen. Menurut Brugmans usaha yang dilakukan oleh Van Der Capellen adalah usaha untuk mewujudkan kebijakan politik Belanda, yaitu: harus menghormati unsur pribumi dalam masyarakat dan keengganan menolak kebudayaan asli dalam hubungannya kebudayaan asing yang bercorak barat.²⁹ Namun demikian, karena berbagai alasan teknis, kebijakan tersebut akhirnya tidak dilaksanakan.

²⁶ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. vii-viii

²⁷ Amin Abdullah, "Desain Pengembangan Akademik IAIN menuju UIN Sunan Kalijaga: dari penekatan Dikotomis-Atomistik ke arah integratif-interdisipliner" dalam Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu dan Agama...*, hlm. 242

²⁸ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 2-3.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

Salah satu alasannya adalah inspektur pendidikan Pribumi yang pertama, yaitu J.A. van der Chijs, pada tahun 1865 menolak menyesuaikan pendidikan Islam yang ada. Bahkan, sekolah-sekolah Zending (bercorak kolonial) yang ada pada saat itu di usulkan agar materi-materi pendidikan agama yang ada dikurangi, sedang mata pelajaran umum ditingkatkan. Sekolah Zending ini pada akhirnya masuk kedalam sistem pendidikan umum Gubernemen. Secara teknis, memasukkan sekolah tersebut kedalam sistem sekolah umum lebih mudah dari pada memasukkan psantren kedalam sistem pendidikan umum. Hal itu, antara lain disebabkan para murid sekolah tersebut sudah terbiasa dengan tulisan latin.³⁰

Pada tahun 1888 menteri kolonial menolak memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah islam, dengan alasan Gubernur Jendral tidak mau mengorbankan keuangan negara untuk sekolah-sekolah tersebut. Karena, hal tersebut dinilai akan membahayakan kewibawaan pemerintah kolonial. Berdasarkan hal tersebut, maka didirikanlah sekolah-sekolah desa, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang membuka jalan pada terwujudnya pendidikan umum. Dan pada saat yang bersamaan, usul untuk menggabungkan pendidikan Islam di tolak.³¹

Pada akhirnya, sekolah Islam sejak saat itu mengambil jalannya sendiri, lepas dari gubernemen, tetap berpegang tradisi sendiri, tetapi juga terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, setidaknya dapat dipahami sebagai sebuah strategi dalam rangka menyingkirkan gerakan Islam. Bisa jadi, dengan adanya politik ini Belanda bisa lebih aman dari ancaman perlawanan atau setidaknya dari munculnya sikap kritis dikalangan umat Islam pribumi yang diakibatkan adanya lembaga pendidikan Islam. Ide brilian pemerintah kolonial dalam menekan pendidikan Islam di Indonesia berdampak hingga saat ini. Bangsa indonesia mewarisi dualisme dalam bidang pendidikan, yang satu bernaung pada bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan yang lain bernaung di Kementerian agama (Kemenag).

Implementasi dualisme lambaga pendidikan Islam pada akhirnya tidak hanya berhenti di ranah madrasah. Dampak dualisme lembaga dalam tubuh madrasah tidak begitu terasa paling tidak dalam wilayah sistem manajemen nya karena kebijakan manajemen masih dalam satu atap di bawah kendalai Kementrian Agama. Untuk itu dalam tulisan ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai dualisme kebijakan yang terjadi di pada pendidikan tinggi Islam khususnya yang terjadi di UIN. Hal ini dikarenakan UIN mempunyai fakultas agama dan umum, dimana keduanya berada pada kebijakan yang berbeda yaitu fakultas agama di bawah Kementerian Agama dan fakultas umum di bawah Kementerian pendidikan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

³¹ *Ibid.*, hlm. 7.

dan kebudayaan. Fenomena tersebut berakibat pada gerahnya kaum intelektual Islam melihat adanya dualisme lembaga pendidikan Islam ini sehingga muncul gagasan-gagasan pembaharuan yang disampaikan oleh para intelektual Islam seperti Naquib al-Attas, Kuntowijoyo, Amin Abdullah dan yang lainnya.

Ada kebijakan penting yang menjadi cikal bakal “perceraian” dan terbentuknya polarisasi lembaga pendidikan di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1950 ketika presiden Soekarno menetapkan berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM) bagi golongan nasionalis, dan dalam waktu yang bersamaan menetapkan perguruan tinggi Islam negeri Yogyakarta bagi umat Islam. Implikasi negatif yang muncul dari adanya polarisasi lembaga pendidikan tersebut adalah tidak berimbangnya wacana keilmuan yang dikembangkan. UGM melakukan kajian ilmu umum secara total tanpa disertakan dengan nilai-nilai etika dan moral keagamaan, begitu juga kepada perguruan tinggi Islam negeri Yogyakarta yang hanya mengkaji ilmu agama dan kering dari kajian ilmu umum. Dikotomi dan dualisme terus bertahan dan bahkan melebar, sekolah atau perguruan tinggi umum menjadi binaan Diknas (sekarang: Kemdikbud).³²

Masalah selanjutnya adalah adanya ketimpangan antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum. Ketimpangan tersebut diantaranya meliputi anggaran, serta pengakuan eksistensi lembaga pendidikan. Anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada lembaga pendidikan Islam terlampau minim dan tidak sebanding dengan yang diberikan kepada pendidikan umum. Hal ini tercermin dari sistem penganggaran untuk lembaga pendidikan Islam yang hanya diambil dari sektor agama yang menyatu dengan masjid, pesantren, majelis taklim, dan haji, bukan sektor pendidikan.³³ Dengan demikian, sudah menjadi kepastian bahwa pengembangan lembaga pendidikan Islam menjadi sangat terhambat dan tertinggal jauh dari lembaga pendidikan umum. Puncaknya ketika keberadaan dan lulusan madrasah termasuk PTAIN/IAIN tidak dianggap sederajat dengan lembaga pendidikan umum. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa lembaga pendidikan Islam dinilai lebih menekankan dakwah dan urusan ukhrawi daripada akademis dan keilmuan yang menjawab tantangan zaman.

Melihat masalah yang dihadapi lembaga pendidikan Islam, para elit umat Islam saat itu tak tinggal diam terlalu lama. Banyak upaya yang ditempuh dalam rangka mensejajarkan lembaga pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Hal ini dapat kita lihat dari semangat keilmuan di lingkungan IAIN yang terus tumbuh dan berkembang. Untuk menampik anggapan bahwa IAIN hanya berkutat kepada

³² Marwan Sarijo, *Bunga Rampai...*, hlm. 25.

³³ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma humanis Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 175.

ikhwal ukhrawi, metodologi ilmu-ilmu sosial dalam kajian-kajian agama mulai diperkenalkan. Selanjutnya muncul juga wacana pengembangan IAIN menjadi UIN dengan harapan mampu mengembangkan lembaga pendidikan Islam dengan lebih maju, terkait kelembagaan juga banyak wacana yang berkembang. Sampai pada wacana penempatan IAIN dalam satu atap pendidikan yakni di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).³⁴

Konversi IAIN-UIN (Sebuah Kritik)

Memang benar, ada catatan penting yang termaktub dalam surat Mendiknas yang ditujukan kepada menteri Agama, tanggal 23 Januari 2004 yaitu: “Meskipun IAIN Sunan Kalijaga dan STAIN Malang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Malang, namun tugas pokoknya tetap sebagai instusi pendidikan tinggi bidang agama Islam, sedangkan penyelenggaraan program non-agama Islam (umum) merupakan tugas tambahan”.³⁵ Namun demikian, catatan ini pada realitasnya sulit untuk diimplementasikan. Sekali lagi tuntutan pasar yang memaksa UIN akan berlomba membuka fakultas umum dan pada akhirnya fakultas tersebut akan menggeser fakultas agama seperti yang terjadi di UII dan Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu saya samapaikan ada empat pertimbangan yang disampaikan oleh Ahmadi untuk kita perhatikan bersama, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan pengalaman sejarah, dalam pengembangan pendidikan syahwat politik umat Islam sangat dominan. Kecenderungan politis yang dipayungi dengan landasan teologis, Nampak ketika umat Islam beramai-ramai mendirikan perguruan tinggi tanpa studi kelayakan akademis. Sekarang di seluruh Indonesia terdapat 14 IAIN, 33 STAIN, dan ratusan PTAIS (khusus Jawa Tengah ada 25 PTAIS). Ketika animo mahasiswa semakin kurang mereka kebingungan, akhirnya berusaha membuka program pendidikan umum yang diperkirakan laku jual. Ketika lulusannya ditolak untuk mendaftarkan calon pegawai negeri, semakin bingung lagi karena dibayangi kematian pelan-pelan. Oleh karena itu, dalam konteks UIN syahwat politik mesti ditinggalkan dan pertimbangan akademis harus benar-benar dipegang teguh. Kalau hal ini tidak dilakukan hamper bisa dipastikan di kemudian hari nasibnya akan sama dengan PTAI.

Kedua, perlu dipertimbangkan konsekuensi penggunaan predikat Universitas Islam Negeri, yakni karakteristik apa yang dapat ditawarkan. Misalnya landasan epistemologinya yang secara eksplisit berbeda dengan perguruan tinggi lain,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 176-177.

³⁵ Dokumen Surat Menteri Pendidikan Nasional, dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 6.

wawasan keislaman yang relatif lebih luas, dan komitmen terhadap Islam lebih tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi lain.

Ketiga, Keberadaan UIN sekarang masih menunjukkan dualisme kelembagaan. Misalnya berdasarkan Kepres No. 50 tahun 2004 tentang perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pasal 2 ayat (2) bahwa UIN Sunan Kalijaga secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Agama. Dualisme kelembagaan ini sudah semestinya dihilangkan, serahkan saja sepenuhnya ke Kemdikbud agar prinsip efisiensi dan fungsional dapat dijalankan karena secara fungsional yang tepat mengurus pendidikan adalah Kemdikbud. Beban politis ideologis sudah selayaknya dihilangkan, artinya tidak perlu khawatir nilai dan pesan-pesan agama Islam terdistorsi karena sudah ada undang-undang pendidikan nasional yang menjamin tumbuh kembangnya nilai-nilai agama dalam pendidikan formal.

Keempat, dengan diserahkannya UIN ke Kemdikbud mestinya memberi peluang yang sama kepada universitas-universitas lain yang akan membuka fakultas agama (Islam) untuk ikut memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam secara akademis. Hal ini jangan dianggap rival, tetapi justru memperluas medan *musābaqah fi al-khairat* dalam keilmuan.³⁶

Adanya konversi IAIN ke UIN menimbulkan banyak problem yang tersisa, diantaranya adalah bekrnanan dengan efetifitas menejerial lembaga pendidikan. Manajemen modern mengenalkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan fungsional sebagai kunci keberhasilan manajemen. Adanya dualisme kebijakan dalam tubuh UIN jelas tidak menjalankan prinsip manajemen tersebut efektifitas kelembagaan menjadi sangat terhambat kerana harus keluar masuk melalui dua pintu yang berbeda bahkan saling berhadapan. Bahkan nama baik kelembagaan Kementerian Agama perlu dipertanyakan kembali didalam manajemen dan pengelolaan pendidikan.³⁷

Ranah pengelolaan pendidikan yang selama ini oleh Kementerian Agama sudah sedemikian luas, tidak hanya pendidikan agama tetapi mencakup hampir semua bidang ilmu pengetahuan, sehingga keberatan beban. Jika ini diteruskan justru tidak dapat diharapkan Kementerian Agama mempunyai kualitas yang mampuni terhadap pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam diselenggarakan disemua jenjang sekolah umum, sekolah Islam, dan madrasah ketiganya bersama dengan pesantren merupakan jenis-jenis yang disebut sebagai pendidikan Islam.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 185-187.

³⁷ Ahmadi, *Ideologi*, hlm. 186.

³⁸ Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 365.

Selain itu, lembaga pendidikan tinggi Islam berupa UIN yang berada sebagian di bawah Kementerian Agama juga dapat dipandang mengalami kelebihan muatan. Untuk itu perlu adanya pemikiran ulang untuk menjawab permasalahan dualisme lembaga pendidikan tinggi Islam berupa hibridasi lembaga pendidikan tinggi.

Hibridasi Lembaga Pendidikan Tinggi

Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa akar keterpurukan penguasaan ilmu pengetahuan Islam adalah karena adanya dikotomi dan dualisme lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan di Indonesia polarisasi lembaga pendidikan ini juga dimulai dari catatan yang panjang yaitu pada masa pemerintahan kolonial. Untuk menjawab permasalahan tersebut telah ada upaya yang dilakukan misalnya dengan transformasi IAIN ke UIN. Namun pertanyaan selanjutnya adalah haruskah permasalahan tersebut diselesaikan dengan konversi IAIN ke UIN? Pertanyaan besar tersebut yang selalau menjadi perdebatan panjang untuk menyelesaikan dikotomi dan dualisme lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, tentu pendapat tersebut belum menjadi konsensus bersama, ada yang menganggap ketika umat Islam sudah mengatakan perlu ada Islamisasi ilmu atau integrasi ilmu, maka kita sudah menyepakati adanya dikotomi Islam dan ilmu. Padahal jika kita berangkat dari keyakinan bahwa seluruh ilmu berasal dari Tuhan maka sejatinya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentu ada banyak pandangan dan pendapat yang saling mendukung atau bahkan saling bertentangan. Tulisan ini hendak memberikan pandangan yang mungkin dianggap bersebarangan, bukan bermaksud untuk melakukan perlawanan secara terbuka, namun dalam rangka sumbangsih pemikiran untuk menjadikan segalanya menjadi lebih baik. Salah satu pandangan yang menarik adalah apa yang disampaikan Ahmadi yang dikutip Rosihan bahwa dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama pada ilmu moderen tidak selamanya dan harus menggunakan jalur pemisahan lembaga pendidikan agama dan umum.

Ahmadi membuat perbandingan di negeri Belanda dalam penelitiannya tahun 1993-1994 tentang studi agama di Belanda, bahwa negara yang menganut paham sekuler, masalah pendidikan agama di Perguruan Tinggi yang bermuatan pesan-pesan spiritualitas dijembatani dengan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan *Duplet Ordo* dengan produk pendeta-pendeta Kristen yang mempunyai komitmen kuat dengan agamanya.³⁹ Artinya nilai-nilai dan pesan agama ditanamkan pada setiap perguruan tinggi dengan komposisi yang besar dan

³⁹ Ahmadi, dalam Rozihan, *Merombak Pendidikan Islam*, (Koran Suara Merdeka, 7 Januari 2005), hlm. 18.

menjadikannya sebagai dasar yang kuat bagi seluruh ilmu umum. Jika Belanda sebuah negara yang sekuler juga mampu melaksanakan Pendidikan Agama di perguruan tinggi dengan pendekatan religius, maka Indonesia dengan negara baragama sudah pasti jauh lebih mampu melaksanakannya.

Seperti yang telah disebutkan, memang ada banyak gagasan bermunculan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam upaya menjadikan nilai Islam sebagai pondasi ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi penting karena ketika ilmu pengetahuan tidak dilandasi dengan nilai agama yang mantap, maka ilmu itu akan digunakan kepada hal yang jauh dari nilai etika dan moral. Iman yang tidak disertai ilmu, mudah ditipu, demikian sebaliknya ilmu tanpa iman, menjadi penipu.⁴⁰

Dalam bagian ini, penulis akan mencoba memberikan gagasan mendasar tentang upaya yang harus dilakukan agar pesan-pesan agama masuk ke dalam seluruh ilmu umum yang ada. Berdasarkan pada permasalahan tentang tidak efektifnya pola-pola integrasi dan islamisasi yang dilakukan, maka penulis menawarkan gagasan yang mungkin cukup kontroversial yaitu dengan meleburkan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum. Ikhtiar ini terangkum dalam konsep yang saya namakan hibridasi lembaga pendidikan tinggi. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar gagasan tersebut.

Pertama, lembaga pendidikan tinggi Islam yang selama ini digadang-gadang menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu mengentarkan para mahasiswanya menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama nampaknya telah gagal mengemban amanah tersebut. Indikator sederhananya adalah belum banyak sarjana dari lembaga pendidikan tinggi Islam yang membuka fakultas umum belum mampu bersaing secara terbuka dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan. Walaupun memang alasannya adalah waktu yang masih singkat tapi nampaknya tanda-tanda adanya perbedaan yang signifikan belum nampak. Ini menandakan bahwa mitos lembaga pendidikan tinggi Islam hanya bertumpu pada penguatan materi agama masih berlaku.

Kedua, secara keseluruhan lembaga pendidikan tinggi Islam baik negeri maupun swasta belum menjadi pilihan pertama para orang tua untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya, gedung dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan yang kurang lengkap, dosen dengan kompetensi akademiknya minim, serta hal-hal lain yang berakibat pada lembaga pendidikan tinggi Islam hanya akan menjadi pilihan selanjutnya ketika tidak diterima di lembaga pendidikan tinggi umum. Dengan demikian, input yang ada pada lembaga pendidikan tinggi Islam jelas berada pada level bawah dari lembaga pendidikan tinggi umum.

⁴⁰ Rozihan, *Merombak Pendidikan Islam*, (Koran Suara Merdeka, 7 Januari 2005), hlm. 18

Ketiga, materi agama yang diajarkan pada fakultas-fakultas agama dan materi agama yang diajarkan pada fakultas umum sangat rentan dengan kepentingan politis suatu golongan saja. Misalnya dalam materi pelajaran *fiqh*, doa-doa bacaan shalat dan tata cara shalat dan ibadah yang lain cenderung hanya memberikan contoh bacaan ataupun gerakan-gerakan dari satu sumber saja. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bacaan dan gerakan tersebut sebenarnya tidak hanya dari satu sumber saja yang sama-sama *shahih*. Dengan demikian, materi agama yang ditawarkan tidak mampu menampung seluruh golongan agama dengan keyakinan ibadahnya masing-masing.

Berdasar beberapa alasan di atas, maka penulis menyarankan beberapa gagasan yang walaupun akan memakan waktu yang sangat lama, namun harapannya hasilnya dapat dirasakan dan apa yang menjadi keinginan bersama bahwa nilai-nilai agama dapat tumbuh dan bersama ilmu umum dapat terwujud. Beberapa tawaran konsep tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan hibridasi atau penggabungan lembaga pendidikan tinggi Islam dan lembaga pendidikan umum dalam sebuah format baru. Dengan demikian, paling tidak secara manajemen dan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien karena hanya berada pada satu atap dan satu kendalai.

Kedua, melakukan penggabungan materi agama dan materi ilmu pengetahuan umum menjadi satu materi ilmu pengetahuan umum. Penggabungan ini dengan maksud merubah materi-materi yang berangkat dari logika yang kahir dari keilmuan sekuler murni dengan materi yang didasarkan pada nilai-nilai agama universal. Hal ini dilakukan karena ilmu tidak bebas nilai dan nilai.

Ketiga, memberikan pemahaman dan peningkatan kualitas dosen mata kuliah umum tentang nilai-nilai agama pada mata kuliah yang mereka ampu. Mata kuliah umum yang dimaksud meliputi seluruh mata kuliah ilmu yaitu sains, sosial, dan humaniora. Dengan demikian, para dosen mata kuliah umum mampu menerapkan dan menyampaikan materi yang bermuatan nilai Islam

Kempat, pemerintah menyusun kurikulum dan materi kuliah umum yang berisi muatan yang nilai-nilai agama universal pada seluruh mata kuliah ilmu pengetahuan umum. Dengan catatan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Islam universal yang bisa disepakati bersama oleh seluruh umat Islam. artinya bukan pada wilayah materi ibadah, muamalah dan setrusnya yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Karena wilayah ibadah adalah wilayah privat hamba dan Tuhannya.

Jika tiga usulan tersebut dapat dipraktekan walaupun disadari memerlukan waktu yang panjang, namun penulis yakin bahwa nilai-nilai agama akan masuk

dan menjadi pondasi bagi seluruh ilmu umum yang ada. Selain itu, konsep ini juga diharapkan akan menghasilkan alumni yang mempunyai etika dan moral yang kuat dalam mempraktekan ilmunya untuk kesejahteraan bersama. Jika hal demikian terjadi, maka cita-cita mulia lulusan perguruan tinggi menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama nampaknya akan semakin dekat dengan kenyataan.

Simpulan

Hibridasi lembaga pendidikan adalah sebuah penggabungan secara total lembaga pendidikan tinggi Islam dan pendidikan tinggi umum dalam satu naungan lembaga dan kebijakannya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian dari sisi manajemen kelembagaan dapat lebih efektif dan efisien. Selain masalah kelembagaan dalam wacana hibridasi ini juga dalam wilayah kurikulum pendidikan dimana Islam dan ilmu umum diintegrasikan. Diperlukan kurikulum baru yang menggabungkan materi mata kuliah umum dan Islam dalam bentuk satu materi yakni seluruh materi umum didasari dengan nilai Islam yang universal. Dalam hal ini, mata kuliah ke-Islaman tidak berdiri sendiri, namun dicangkokkan ke dalam mata kuliah umum yang lain. Walaupun mata kuliah ke-Islaman dihapus, namun materi pengajaran berupa nilai-nilai Islam masuk ke dalam setiap mata kuliah yang ada. Sehingga, setiap mata kuliah mengandung pengajaran ke-Islaman sebagai landasan moral dan etika dalam berilmu.

Selanjutnya, perlu dipersiapkan para dosen yang memiliki wawasan etika Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ranah aksiologi ilmu, seorang intelektual memerlukan pegangan moral sehingga ilmu yang dimiliki bisa menjadi berkah kemanusiaan, bukan bencana. Disinilah nilai-nilai kemanusiaan Islam perlu disematkan pada setiap pengajar di perguruan tinggi.

Hibridasi dalam materi secara teknis, materi Islam yang diintegrasikan pada materi pengetahuan umum bukan pada wilayah ibadah, muamalah namun pada nilai Islam yang juga dapat diterima oleh semua golongan bahkan lintas agama. Jika hal tersebut terjadi maka materi ilmu umum akan didasari dengan nalar Islam dan mahasiswa akan dapat mengamalkan ilmunya untuk hal kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat dan sekalian alam. Dengan pencangkokan dalam empat ranah tersebut, Islam tidak akan pudar, namun menggemma disetiap disiplin keilmuan yang dipelajari, selain itu ilmu tidak hampa akan moral dan nilai-nilai Islam yang universal.

Rujukan

- Abdullah, Amin. “Desain Pengembangan Akademik IAIN menuju UIN Sunan Kalijaga: dari penekatan Dikotomis-Atomistis ke arah integratif-interdisiplinari” dalam Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma humanis Teosentris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Ahmadi, dalam Rozihan. *Merombak Pendidikan Islam*, Koran Suara Merdeka, 7 Januari 2005
- Azra, Ayzumardi. “Reintegrasi ilmu-ilmu dalam Islam”, Zainal Abidin Bagir, (ed) *Integrasi Ilmu dan Agama: Intepretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam :Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: LOgOS, 1999
- Dokumen Surat Menteri Pendidikan Nasional, dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*, Yogyakarta: Suka Press, 2007
- Hasim, Rosnani. “Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer: Sejarah, Perkembangan Dan Arah Tujuan”, *Islamika*, tahun 1 No 6, Juli-September 2005
- Hitti, K. Philip. *History of The Arab*, London: Macmillan Press Ltd, 1974
- Hourani, Albert. *Ahistory of Arab Peoples*, New York: Warner Books, 1992
- Kartanegara, Mulyadi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekontruksi Holistik*, Bandung: Arasyi Mizan, 2005
- Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Yogyakarta: Teraju, 2004
- Ma’arif, A. Syafi’i . *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993
- Mahzar, Armahedi. *Revolusi Integralisme Islam*, Bandung Mizan, 2004
- Maksidi, George. *Religion, Law and Learning*, Great Britain: Voriorum, 1991

- Maksidi, George. *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West: With Special Reference to Scholasticism*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990
- Mulkhan, Abdul Munir, *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The Chicago University Press, 1984
- Rozihan, *Merombak Pendidikan Islam*, Koran Suara Merdeka, 7 Januari 2005
- Saridjo, Marwan, *Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amisco, 1996
- Setiawan, Iwan, dalam Amin Abdullah dkk, *Islamic Studies dalam paradigma Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, :SUKA Press, 2007
- Steenbrink, A. Karel, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986